

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan juga tentang masalah pajak. Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan “Pajak”, namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan titapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2002 : 4).

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai

kebijakan perpajakan dan retribusi daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Kebijakan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Pemungutan Pajak Daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Sebagai pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat di jadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah berikutnya. Pengukuran kinerja disini

menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari Rasio Efektifitas, Rasio Pakal Daerah terhadap PAD, dan Analisis Trend. Dari uraian tersebut kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, (Mahsun, 2011:141). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang didarivasi dari tujuan

strategis organisasi (Mahsun, 2011:141). Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja membantu pemerintah dalam memonitor implementasi strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis.

Kota Batam saat ini mengenal dua badan dalam mengelolan kotanya, yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (PEMKO). Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Sedangkan Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkup hidup dan mengelola pendapatan daerah.

Kota Batam merupakan salah satu daerah yang memiliki letak dan potensi daerah yang baik dan kinerja penerimaan Pajak Daerah tersebut perlu diukur untuk pembangunan. Pembangunan di daerah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala bidang, perkembangan ini dikarenakan pendapatan rata-rata daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah tersebut, salah satunya berasal dari Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM“**

## 1.2 Penjelasan Judul

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham terhadap judul tugas akhir ini, maka akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tugas akhir tersebut.

1. **Analisis** adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah Bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.
2. **Kinerja** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.
3. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. **Pendapatan Asli Daerah** adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja penerimaan Pajak Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD ?
2. Bagaimana Analisis Trend untuk Rasio Efektivitas dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD Kota Batam ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.
2. Sebagai perkiraan kinerja keuangan melalui Analisis Trend untuk Rasio Efektivitas dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD kota Batam.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu perpajakan dan mendapatkan gambaran serta pengalaman dalam perpajakan terutama bagian Pajak Daerah.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang sama.

### 4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

## 1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

#### a. Jenis Data

Data yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, data atau keterangan dari instansi yang berkaitan dengan objek yaitu melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### b. Metode Pengumpulan Data

##### 1) Metode Wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan data pembuatan Tugas Akhir yaitu pegawai Dinas Pendapatan Kota Batam

##### 2) Metode Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap sesuatu yang diteliti dan melakukan pencatatan tentang apa yang telah diamati.

### 3) Studi Pustaka

Peneliti mencari buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang mendukung penulisan Tugas Akhir.